



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KOORDINASI BADAN LEGISLASI
DENGAN MENKUMHAM DAN DPD RI DALAM RANGKA
PEMBAHASAN PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2016**

TANGGAL 17 NOVEMBER 2015

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 3 (tiga)
Jenis rapat	: Rapat Koordinasi
Hari/tanggal	: Selasa, 17 November 2015.
P u k u l	: 17.35 WIB s/d 17.55 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Pembahasan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016.
Ketua Rapat	: Dr. Sarehwiyono, S.H., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 33 orang, izin 12 orang dari 74 orang Anggota. - 15 orang dari Pemerintah - 9 orang dari DPD RI

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Koordinasi Badan Legislasi dengan Menkumham dan DPD RI dalam rangka pembahasan usulan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016, dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. H. Sarehwiyono, S.H., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 17.35WIB, selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan kepada Menkumham untuk menyampaikan usulan/pandangan.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Menkumham menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :
1. Pemerintah mengapresiasi undangan rapat koordinasi dengan DPR dan DPD RI untuk melakukan pembahasan usulan RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016.
 2. Sehubungan adanya penugasan yang diberikan oleh Presiden pada sore hari ini, Menkumham mengusulkan kiranya pembahasan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 dapat ditunda sampai dengan pekan depan.
 3. Penundaan dilakukan agar Pemerintah dapat menyempurnakan bahan-bahan yang terkait dengan usulan RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016.
 4. Diharapkan nantinya pembahasan mengenai Prolegnas RUU Prioritas dapat dibahas secara fokus dan sesuai dengan harapan masyarakat.
- B. Tanggapan Pimpinan DPD RI sebagai berikut :
1. Dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016, DPD RI telah mempersiapkan 15 draft RUU beserta Naskah Akademisnya untuk diusulkan masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016.
 2. 15 (lima belas) draft RUU tersebut merupakan bentuk kontribusi langsung DPD RI terhadap *output*/hasil legislasi yang dihasilkan oleh DPR.
 3. Mengingat masyarakat luas sudah menunggu daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 ini, penundaan yang diusulkan oleh Pemerintah dapat dipenuhi, namun dengan catatan bahwa penundaan ini tidak melebihi waktu satu pekan.
- C. Tanggapan Anggota Badan Legislasi sebagai berikut :
1. Mengingat legislasi merupakan hal yang penting, kiranya pembahasan rapat tidak dapat dilakukan secara terburu-buru karena dapat mengakibatkan hasil dari pembahasan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 menjadi kurang baik.
 2. DPR perlu mempertimbangkan penundaan yang diusulkan oleh Pemerintah untuk memberikan waktu kepada Pemerintah dalam melengkapi hal-hal yang diperlukan.
 3. Meskipun pembahasan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 sudah terlambat sebagaimana amanah UU, namun apabila pembahasan dilakukan secara terburu-buru akan menghasilkan Prolegnas yang kurang berkualitas dan berpihak kepada rakyat.
 4. Diharapkan penundaan pembahasan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 tidak lebih dari satu minggu.

III. KESIMPULAN

Rapat Koordinasi antara Badan Legislasi dengan Menkumham dan DPD RI dalam rangka pembahasan usulan RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 menyetujui/menyepakati untuk ditunda dan akan diagendakan kembali.

Rapat ditutup pukul 17.55 WIB

Jakarta, 17 November 2015
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001